**DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi.2017 Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Hlm 69. 2-3.

Aan Komariah, Djam’an Satori. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta,hlm.149.

Adami Chazawi. 2005. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Hlm. 14

Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta. h. 109- 111.

Angel Michelle Karinda. 2012. Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah(Bumi Aksara

Andi Hamzah. 2009. Delik-delik Tertentu Dalam KHUP, (Jakarta: Sinar Grafika), 135.

Ani Sri Rahayu,2018. Pengantar Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm 185.

Bambang Trisantono Soemantri, 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,(Bandung: Fokusmedia), h.251

Barda Nawawi Arif, 2015. Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung. Hlm 37

Bemmelen, J.M. Van, 2015, Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier, Binacipta, Bandung, h.53.

Didik G. Suharto, 2016, Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 193.

Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta. h. 73.

Hanif Nurcholis, 2014. Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, (Jakarta: PT Grasindo) hlm 238.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi.2014 Hukum Pidana, Kencana, Jakarta. Hlm 3

Ihsan. Fuad. 2008. Dasar Dasar Kependidikan, Jakarta: Rineka Cipta

Kiana Putri, 2019 . Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, (Krajan: Desa Pustaka Indonesia) hlm.5

N.Daldjoeni, 2011. Interaksi Desa – Kota,(Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 4.

Nurcholis, 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. (Malang : Setara Press), hlm. 22.

Ni’matul Huda,2015. Hukum Pemerintahan Desa, (Malang: Setara Press, 2015),h.222

Maria SW Sumardjono. 2001. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Penerbit PT Gramedia, hlm.99

Musdalifa R. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Sarjana, Fak.Hukum, Unhas,Hal 1

Muhammad Sadi Is. 2017. Kumpulan Hukum Acara di Indonesia,(Palembang: CV. Cita Intrans Selaras)

Muhamad Mu’iz Raharjo, Tata Kelola Pemerintahan Desa, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2021) hlm 8.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51.

Moeljatno. KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), hlm 96

Ramlan, Eka N.A.M Sihombing, 2021. Hukum Pemerintah Desa, (Medan: Enam Media),hal 3

R.Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, hal 195

Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

R.Bintarto, 2010. Desa Kota , (Bandung : Alumni), hlm.6.

Saptono Rahardjo. 2017. Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP- KUHAP Beserta Penjelasannya, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), 684.

Soerjono Soekanto. 2017. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm.172,

Sudikno Mertokusumo. 2016. Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta. Hlm 10

Sri Mintarjo, Eka Susi Sulistyowati,2019 Perwilayahan Desa dan Kota, (Klaten: Suka Mitra Kompetensi), hlm. 21

Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi,2011. Hukum Pelayanan Publik, (Malang: Setara Press,), h.73.

Tri Andrisman, 2009 .Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung. Hlm 70

**PERATURAN :**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Taun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Kompetensi Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 TentangPendidikan, (Jakarta: Departemen Agama RI 2003)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Repbuplik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**WEB :**

Yudi Wiyono. Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah. www.Indoskripsi.Com. Diakses Tanggal 13 Desember 2021

Kusuma, Rahayu Pratiwi, “Makalah Sistem Pendidikan Nasional”, Unduhttp://rahayukusumapratiwi.blogspot.com/2013/01/makalah-sistem-pendidikan-nasional.html, (diakses pada 1 Desember 2021, 21.50)

Wahyono. Budi, “Defenisi dan DasaR Sistem Pendidikan Nasional”, http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/definisi-dan-dasar-sistem-pendidikan.html, (diakses pada 1 Des 2021, 22.25).

Zhalabe: Reading Is Fundamental, “ Visi dan Misi Pendidikan Nasional), http://zhalabe.blogspot.com/2012/03/visi-dan-misi-pendidikan-nasional (diakses pada 1 Dese 2021, 22. 05)

<https://www.penerjemahtersumpahmurah.com/2015/10/pengertian-ijazah-sertifikat-palsu.html> Unduh 21 Juni 2022 Pukul 10.00 wib

<https://uin-malang.ac.id/r/150801/pemegang-ijazah-palsu.html> Unduh 21 Juni 2022 Pukul 10.30

Rizal F . <https://www.zonanulis.com/2020/06/apa-itu-ijazah.html> diunduh tanggal 22 Juni 2022